

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA EKONOMI TERHADAP
PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK
BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2020/PT GTO)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

MUH. HASAN BASRI YUSUF
NPM : 71210123012

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di pertahankan di hadapan Panitia Pengaji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal :

NAMA : **MUH. HASAN BASRI YUSUF**
N.P.M : 71210123012
Prodi/Konsentrasi : ILMU HUKU/HUKUM PIDANA
Judul : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA EKONOMI TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2020/PT GTO)**

Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. (_____)
Ketua
2. Adil Akhyar, S.H., LL.M.,Ph.D. (_____)
Sekretaris
3. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. (_____)
Anggota
4. Dr. Indra Gunawan Purba, S.H. (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N

Sekretaris Program Studi

Adil Akhyar, S.H., LL.M.,Ph.D

Diketahui Oleh Dekan

Dr. Marzuki, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA EKONOMI TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2020/PT GTO).**

Penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang begituikhlas tanpa pamrih dan telah memberikan do'a dan nasihat kepada peneliti.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Marzuki, SH., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan.
3. Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan.
4. Ibu Nurashah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan.
5. Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I saya,
7. Bapak Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D selaku Sekretaris Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU yang sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya hingga penelitian tesis saya dapat selesai dan berjalan dengan lancar.
8. Bapak Dr. Marzuki, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan,
9. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada tesis peneliti sehingga membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

10. Seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaiannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, April 2023

Penulis

Muh. Hasan Basri

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konsep	10
E. Keaslian Penelitian	20
F. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Penelitian	21
3. Alat Pengumpulan Data	22
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..	23
5. Analisis Data	23
BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGAWASAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	25
A. Pupuk Bersubsidi	25
1. Pengertian Pupuk Bersubsidi	25
2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ...	26
B. Pengawasan Pupuk Bersubsidi	35
1. Pengertian pengawasan	35
2. Pengawasan Pupuk Bersubsidi	37
C. Landasan Hukum Mengenai Pupuk	41
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI	56
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	56
1. Pengertian Tindak Pidana	56
2. Unsur Tindak Pidana	57
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	59
B. Tindak Pidana Ekonomi	60
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	62
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi	66
3. Subyek Tindak Pidana Ekonomi	69
4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi	70

C.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi	73
1.	Pertanggungjawaban Pidana	73
2.	Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Positif di Indonesia	80
3.	Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangan	87
BAB IV :	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2020/PT GTO	95
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuahkan Putusan ..	95
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	95
2.	Dasar Pertimbangan Hakim	97
B.	Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuahkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT GTO	99
1.	Posisi Kasus	99
2.	Dakwaan Penuntut Umum	104
3.	Tuntutan penuntut Umum	105
4.	Pertimbangan Hukum Hakim	107
5.	Amar Putusan	108
6.	Analisis Penulis	108
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1989
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Darma S.S., *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, PT Djaniatan, Jakarta, 2004
- Darwis, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru, 2009
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Efendi, Mansur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, 2002
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, Universitas Terbuka, Banten, 2017
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Otto, Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 2020
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rinwigati, Patricia, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan, 2016
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Suantoro, *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Suparmoko, M., *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 2003

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*, Rikena Cipta, Jakarta, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi

C. Jurnal

Amad Sudiro, *Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jurnal Era Hukum, Vol. 9, No. 3, 1996

Chindy Yapin, *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi*

Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2016), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 No. 2, 2019

Danu Bagus Pratama, *Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Rechtens, Vol. 9, No. 2, 2020

Misrah, *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep*, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 2, 2020

Sularno, et al., *Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*, Jurnal Agrosains dan Teknologi, No. 2, Vol. 1, 2016

Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, *Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 2, 2020

D. Internet

<https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>, diakses pada tanggal 03 Maret 2020,pukul 14:37 wib

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/507026/aturan-baru-penyaluran-pupuk-bersubsidi-2022-disahkan>, diakses pada tanggal 04 September 2022 Pukul 02.15 wib

<https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>, diakses pada tanggal 05 September 2022, pukul 01.17 wib